

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Belanja Modal, Ukuran pemerintah daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Status pemerintah daerah, Pengalaman Kepala Daerah, dan Usia Kepala Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2024. Berdasarkan analisis data dan pembahasannya pada bab sebelumnya yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024, sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya rasio belanja modal tidak memberikan dampak terhadap kualitas pelaporan keuangan yang tercermin dalam opini audit, karena penentuan opini audit bukan semata ditentukan oleh besarnya rasio belanja modal, melainkan bagaimana pengelolaan belanja modal. Apakah belanja modal tersebut sudah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara wajar sesuai SAP dan bebas dari salah saji yang material. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan belanja modal di pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam aspek tata kelola dan juga mencerminkan kelemahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Belanja modal belum sepenuhnya dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan, sehingga belum mampu mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai belanja modal yang direalisasikan relatif besar, kualitas pelaksanaannya masih belum optimal. Akibatnya, belanja modal tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang diukur melalui opini audit.

2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya total aset yang dimiliki tidak memengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang tercermin dalam opini audit. Ukuran pemerintah daerah lebih mencerminkan besarnya sumber daya dan kompleksitas organisasi. Pemerintah dengan aset besar menghadapi kompleksitas pengelolaan yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pencatatan dan penilaian aset. Pemerintah daerah dengan aset besar belum tentu memiliki pencatatan aset yang lebih tertib. Meskipun pemerintah daerah memiliki aset yang besar, hal tersebut tidak menjamin laporan keuangan bebas dari salah saji material. Sebaliknya, pemerintah daerah dengan aset yang lebih kecil tetap dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila pengelolaan dan pengendalian dilakukan secara efektif. Dengan demikian, besarnya ukuran pemerintah daerah tidak serta-merta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tanpa didukung oleh sistem pengendalian dan pengelolaan aset yang efektif.
3. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024, sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin besar kemungkinan pemerintah daerah memperoleh opini WTP. Tingginya rasio PAD mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan secara mandiri. Karena PAD berasal dari kontribusi masyarakat daerah melalui pajak dan retribusi daerah, pemerintah terdorong untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas tinggi, yang pada akhirnya tercermin dalam opini audit yang lebih baik. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat

kemandirian keuangan daerah, semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Status pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024, sehingga hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan status administratif antara kabupaten dan kota tidak menentukan kualitas pelaporan keuangan yang tercermin dalam opini audit. Meskipun terdapat perbedaan karakteristik wilayah dan kompleksitas pemerintahan, seluruh pemerintah daerah wajib mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang sama. Selain itu, mekanisme audit oleh BPK yang berlaku sama secara nasional menciptakan standar penilaian yang seragam bagi seluruh daerah, baik kabupaten maupun kota. Dengan demikian, perbedaan status daerah tidak dapat menjadi faktor pendorong kualitas pelaporan keuangan.
5. Pengalaman kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024, sehingga hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya masa jabatan kepala daerah belum tentu dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang tercermin dalam opini audit. Lamanya masa jabatan kepala daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan kompetensi teknis dalam bidang keuangan. Selain itu, proses penyusunan dan pelaporan keuangan daerah tidak dilakukan secara langsung oleh kepala daerah, tetapi oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sehingga faktor yang lebih memengaruhi kualitas pelaporan keuangan antara lain kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi. Dengan demikian, tanpa dukungan sistem kelembagaan dan pengelolaan keuangan daerah yang kuat, pengalaman kepala daerah saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

6. Usia kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024, sehingga hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tua atau mudanya usia kepala daerah belum tentu dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang tercermin dalam opini audit. Usia kepala daerah belum tentu disertai dengan latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi. Selain itu, semakin bertambahnya usia kepala daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan kompetensi teknis dalam bidang keuangan. Dengan demikian, tanpa dukungan pemahaman teknis dan dibantu oleh perangkat daerah, usia kepala daerah tidak menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya dapat menilik kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini agar penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan mendapatkan hasil yang lebih maksimal di masa mendatang. Keterbatasan penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan diukur menggunakan opini audit. Opini audit pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Sumatera Barat periode 2015-2024 didominasi oleh opini WTP yang diberi kode 1, yang menyebabkan sebaran variabel dependen menjadi tidak merata dan mengurangi kemampuan model regresi dalam membedakan secara efektif kualitas pelaporan keuangan. Sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Status Pemerintah Daerah, Pengalaman Kepala Daerah, dan Usia Kepala Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian ke daerah yang mempunyai distribusi opini audit lebih bervariasi. Hal ini penting untuk meningkatkan variasi data dan memungkinkan model analisis mengidentifikasi pengaruh determinan secara lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan menggunakan metode analisis regresi logistik multinomial apabila kategori opini audit lebih dari dua.
2. Berdasarkan uji koefisien determinasi dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan (belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, status pemerintah daerah, pengalaman kepala daerah, dan usia kepala daerah) hanya mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kualitas pelaporan keuangan sebesar 34,4%. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menjawab kekurangan penelitian ini dengan mengganti atau menambah variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan, seperti kapabilitas APIP.

